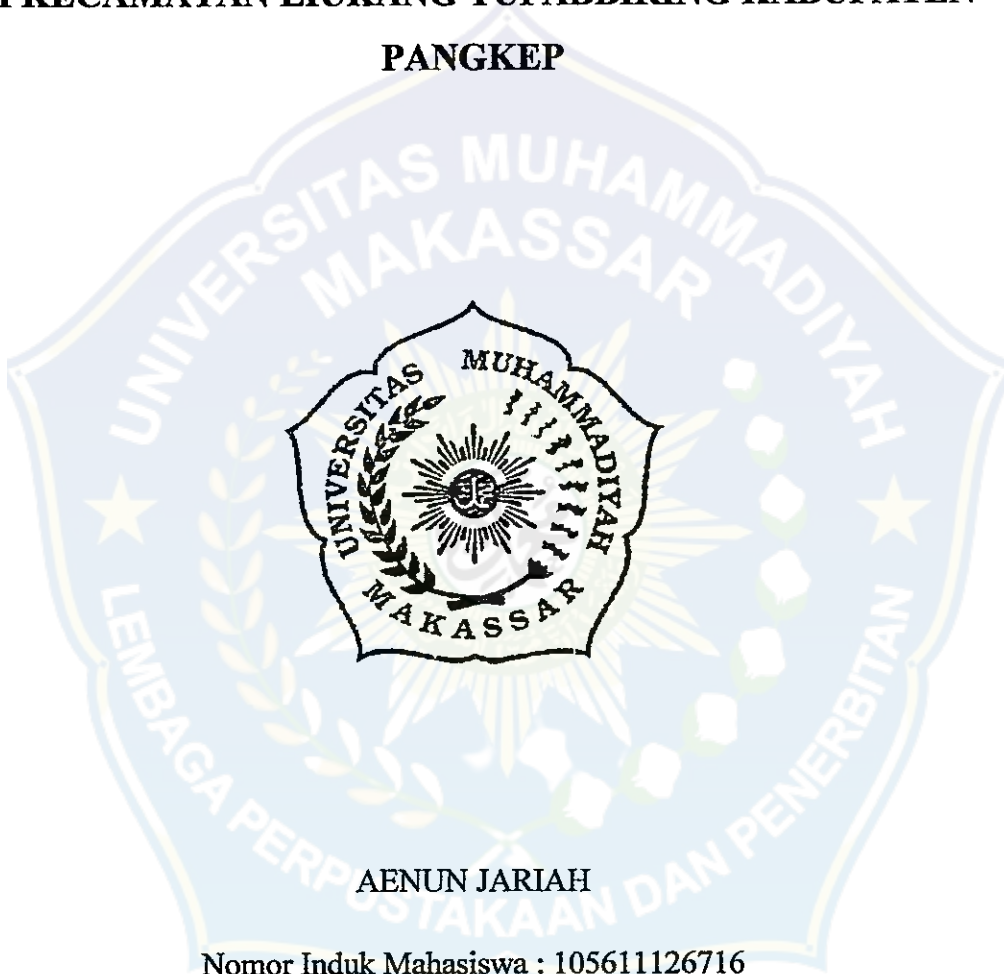


**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM NELAYAN MASUK SEKOLAH  
DI KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING KABUPATEN  
PANGKEP**



**AENUN JARIAH**

**Nomor Induk Mahasiswa : 105611126716**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PROGRAM NELAYAN MASUK SEKOLAH**  
**DI KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING KABUPATEN**  
**PANGKEP**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

**AENUN JARIAH**

**Nomor Stambuk: 105611126716**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

05/02/2022

1 cap  
Smk Alumn

P/0094/ADN/220  
JAR

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Implementasi Program Nelayan Masuk  
Sekolah Di Kecamatan Liukang Tupabbiring  
Kabupaten Pangkep.

Nama Mahasiswa : Aenun Jariah

Nomor Induk Mahasiswa : 105611126716

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Jaelan Usman, M.Si**



**Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos., M.Si**

Mengetahui :

Dekan  
Fisip Unismuh Makassar

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara



**Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**  
NBM: 730727



**Nasrul Haq, S.Sos., MPA**  
NBM: 1067463

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 009/FSP/A.4-II/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada Hari Sabtu Tanggal 29 Bulan Januari Tahun 2022.

### TIM PENILAI

Ketua

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M.Si  
NBM: 730727

Sekretaris

  
Andi Luhur Prianto, S. IP., M. Si  
NBM: 992797

### PENGUJI

1. Dr. H. Lukman Hakim, M. Si

(  )

2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M. Si

(  )

3. Nasrul Haq, S. Sos., M.PA

(  )

4. Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos, M.Si

(  )

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aenun Jariah  
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1126716  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Januari 2022



Aenun Jariah



## **ABSTRAK**

**Aenun Jariah, Jaelan Usman dan Sitti Rahmawati Arfah Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.**

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten pangkep dalam mengatasi kekurangan guru dan mengajarkan kepada peserta didik tentang muatan lokal yang dimiliki Pulau Balang Caddi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Progra Nelayan Masuk Sekolah berjalan atau tidak dan mengetahui hambatan yang mempengaruhi berjalannya Program Nelayan Masuk Sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III. Dengan adanya Program Nelayan Masuk Sekolah dipulau Balang Caddi dapat mengatasi kekurangan guru dan dapat mengajarkan kepada anak didik muatan lokal yang dimiliki Pulau Balang Caddi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program nelayan masuk sekolah dari aspek komunikasi; hal ini didasarkan pada sosialisasi yang dilakukan inovator kepada pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah sehingga tujuan pelaksanaan kebijakan dapat tercapai. sumber daya; didasarkan pada pemilihan narasumber dan sumber daya anggaran diambil dari dana BOS, tetapi sumber daya anggaran belum teralisasi sehingga pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah sedikit terkendala. Disposisi atau sikap pelaksana; dalam hal ini inovator mendukung dan merespon pelaksanaan kebijakan dilihat dari komitmen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi; menentukan pembagian tugas dalam Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah.

**Kata kunci:** Implementasi, Nelayan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur yang tidak terhingga atas kehadiran Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep”**

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan dari penyusunan skripsi ini berkat bimbingan, bantuan, dan saran-saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang terhormat:

1. Bapak Jaelan Usman M.Si selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, memberi masukan serta mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, member masukan serta mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh staf fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai pada dengan tahap penyelesaian studi.
6. Para pihak yang terlibat program nelayan masuk sekolah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
7. Kepada kedua orang tua saya H. Jamuddin dan Hj. Bollo yang telah memberikan dukungan penuh dan memberikan kasih sayang kepada saya selama ini sampai sekarang.
8. Kepada saudara dan sepupu saya terima kasih telah memberikan support kepada saya.
9. Kepada bapak Lukmanul Hakim dan ibu Masdiana Lukman yang telah menjadi orang tua kedua saya di Makassar.
10. Kepada imam badar yang ikut mendukung saya dari semester 5 sampai tahap penyelesaian studi.
11. Kepada teman saya lisa ajo, li, pagga, jum, astri, ocang, didi, imo, abi, andeng dan teman saya di kelas ADN G Dan keluarga federasi (2016) yang telah membantu dalam tahap penyelesaian studi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 Januari 2022



Aenun Jariah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulan.....	7
B. Teori dan Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	9
C. Program Nelayan Masuk Sekolah .....	20
D. Kerangka Fikir.....	22
E. Fokus Penelitian .....	22
F. Deskripsi Fokus.....	24

<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Informan.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Teknik Pengabsahan Data .....	29
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
B. Hasil Penetian.....	40
C. Pembahasan Penelitan .....	56
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. SIMPULAN.....	61
B. SARAN.....	62
<b>DAFTAR FUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.2 Peta Stakeholder .....	20
Tabel 3.1 informan Penelitian .....	27

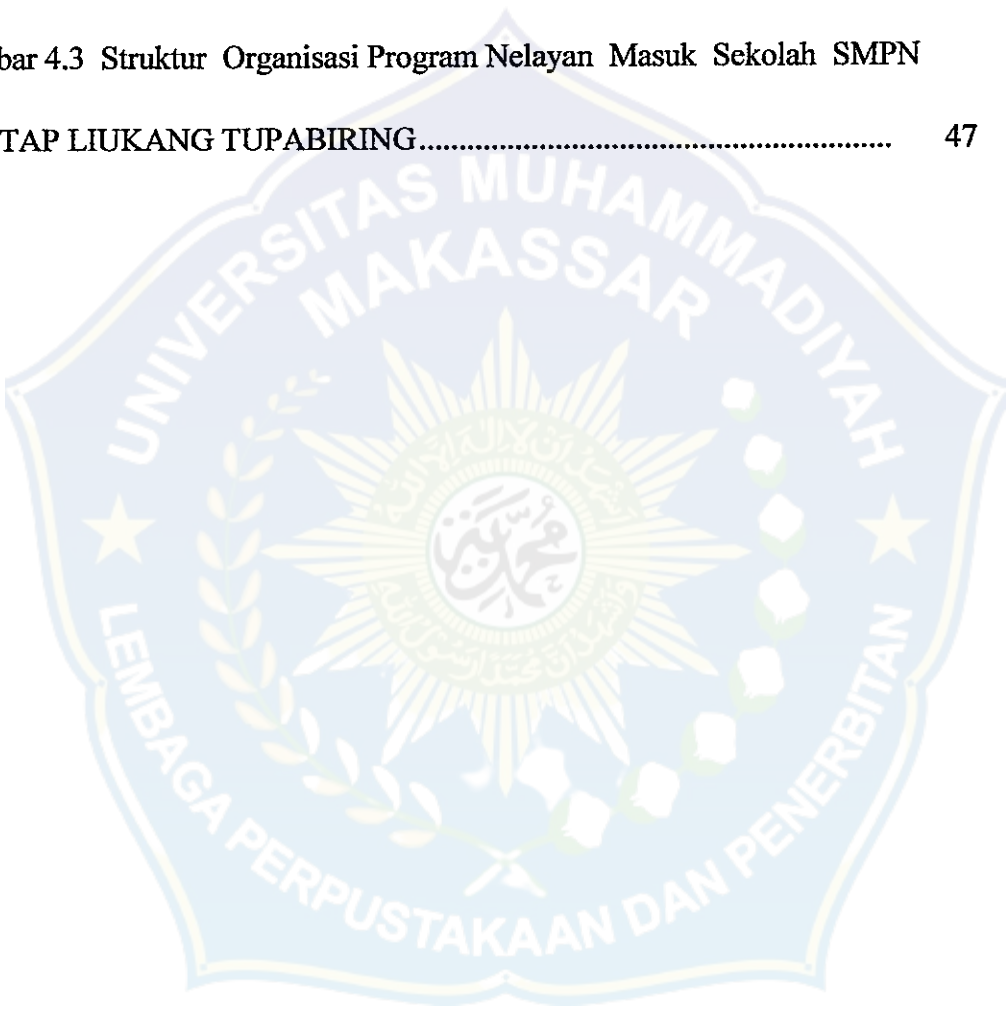


**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 22

Gambar 4.2 Arus Komunikasi..... 43

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Program Nelayan Masuk Sekolah SMPN  
8 SATAP LIUKANG TUPABIRING..... 47



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Wilayah Indonesia merupakan Negara yang dipenuhi ribuan pulau dan memiliki beragam suku, bangsa dan budaya dengan kekayaan adat yang berbeda-beda. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga jika dikaitkan dengan pendidikan yang merupakan hak dasar oleh setiap anak dan warga negara yang di jamin oleh pemerintah baik sarana maupun pendidikan, pendidikan suatu kekuatan dinamis dalam mempengaruhi kemampuan, dalam kepribadian setiap individu. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang mengatur tentang pendidikan menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dilanjut dalam pasal 31 ayat (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Mengenai hak dan kewajiban warga Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. pasal 5 ayat 1-5.

Pendidikan di Indonesia sudah berganti kurikulum setidaknya sebanyak 11 kali pergantian. Kurikulum pertama pada tahun 1947 dinamakan Rencana Pelajaran, tahun 1964 masuk kurikulum Rencana Pendidikan Sekolah Dasar, Kurikulum Sekolah Dasar di tahun 1968, Proyek Perintis Sekolah Pembangunan 1973. Di tahun 1975 Indonesia memasuki Kurikulum Sekolah Dasar, kemudian berganti menjadi Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Revisi Kurikulum 1994 di tahun 1997, Rintisan Kurikulum Berbasis



Kompetensi (KBK) di tahun 2004. Lalu dua tahun kemudian (2006) beralih ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan terakhir Kurikulum 2013 (<https://www.republika.co.id>).

Berbagai kendala pendidikan Indonesia salah satunya adalah masalah putus sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat terdapat 157 ribu siswa SD hingga SMA putus sekolah pada tahun ajaran 2019/ 2020. Siswa yang putus sekolah paling banyak berada di jenjang sekolah dasar (SD) sebanyak 59,4 ribu siswa, tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 38,5 ribu siswa. Di tingkat sekolah menengah atas (SMA) ada 26,9 ribu siswa dan 32,4 ribu siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berhenti sekolah (<https://databoks.katadata.co.id>).

Aspek utama yang juga menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia adalah kekurangan guru. Berdasarkan data Kemendikbud, tahun 2020 terdapat 72.976 guru pensiun. Jumlah tersebut menyumbang kekurangan guru yang angkanya mencapai 1.020.921 orang. Angka ini kemudian naik pada 2021, dengan kekurangan guru diprediksi mencapai 1.090.678 orang dan jumlah yang pensiun 69.757 orang. Tahun 2022 kekurangan guru menjadi 1.167.802 orang, dengan jumlah yang pensiun 77.124 orang (<https://nasional.sindonews.com>).

Di berbagai wilayah terpencil atau perbatasan, jumlah tenaga guru di setiap sekolah semakin berkurang. Tetapi pada kawasan kota dan pinggiran kota, jumlah guru yang ada tidak sebanding dengan beban mengajarnya. Jika

di wilayah terpencil dan perbatasan memiliki jumlah guru sedikit sehingga mereka memiliki beban kerja yang tinggi, maka sebaliknya di kawasan kota dan atau pinggiran kota memiliki jumlah guru yang relatif banyak tetapi beban kerja sedikit. Terkhusus di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkep, terdapat 4 (empat) kecamatan yang berstatus sebagai daerah kepulauan dan terpencil, yaitu Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas, dan Kecamatan Liukang Tangayya. Keempat kecamatan ini memiliki puluhan pulau yang diantaranya ada yang berpenghuni dan adapula yang belum dihuni oleh manusia (M. Ziaul Haq Hs 2018:166)

Dalam menanggulangi kurangnya tenaga pengajar pemerintah kabupaten Pangkep membuat suatu terobosan yang secara tidak langsung mengikut sertakan masyarakat nelayan dalam program tersebut. Sebelumnya pemerintah Kab. Pangkep membuat Program Sekolah Perahu yang membawa nama Kab.Pangkep ke ajang internasional (sebagai peserta *United Nations Public Service Awards* UNSPA yang di selenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tahun 2019 di KANADA) sehingga pemerintah membuat perubahan yaitu Program Nelayan Masuk Sekolah yang launching pada hari Jum'at 5 juli 2019 di gedung pertemuan Appakabaji Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep yang dihadiri langsung oleh wakil Bupati Pangkep H. Syahban Sammana (<https://teropongbulusaraung.com>). Diatur dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep Dan Kepulauan. No 241/1772 disdik Tahun 2019. Tentang Nelayan Masuk Sekolah Pemerintah membuat program ini untuk mengetahui pentingnya pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pendidikan khususnya daerah kepulauan dalam peningkatan peran masyarakat nelayan di sekolah. Sebagai masyarakat ke pulauan perlu kita ajarkan kepada anak sekolah tentang aktivitas nelayan. Adanya program ini perlu di berikan perhatian lebih dan anggaran agar bisa berjalan dengan baik, sehingga wilaya kepulauan semakin maju dalam bidang pendidikan.

Nelayan yang kita ketahui merupakan pencari ikan di ikut sertakan dalam mendidik para siswa di sekolah, masyarakat nelayan sangat paham tentang ilmu perbintangan , tehnik pembuatan jala (jaring) dan cara melihat potensi laut yang dapat berubah-ubah. Manfaat dari program ini untuk mengedukasi anak-anak nelayan atau peserta didik untuk terus bersekolah dalam meningkatkan angka partisipasi bersekolah daerah kepulauan, peran serta masyarakat kepulauan, dengan ini dapat mengatasi kurangnya tenaga pengajar di daerah kepulauan dikarenakan kondisi geografis (<https://teropongbulusaraung.com>).

Edward III dalam Subarsono (2011;90-92) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variable, yaitu: Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Mortiner J. Adler dalam Rosyadi (2004:35) Pendidikan adalah sebaga suatu proses dimana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan,

disempurnakan dengan kebiasaan yang baik melalui sarana dan mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu kebiasaan yang baik.

Beberapa penelitian yang menjelaskan tentang implementasi. Dimas Alif Budin N. M. Saleh Soeaidy. Minto Hadi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar. Vol. 1 No 5. Teguh Aris Munandar. Dadan Darmawan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Lontar Kabupaten Serang. Vol. 5 No 2. Sri Maryuni Implementasi Progra Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pontiana. Vol 10. No 1. Fitriah Y. alim Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pembudidayaan Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Poso. Vol 12 No. 1. Moris Adidi Yogia, Dia Meirina Suri Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Vol 9 No 3.

Program pemberdayaan masyarakat nelayan untuk berperan secara langsung, dalam proses pembelajaran di sekolah secara terprogram dan terorganisir yang di bangun dari sekolah bersama komite sekolah dengan cara kemampuan skill tentang laut oleh nelayan yang diorganisir dapat diajarkan. Nelayan memiliki keahlian skill tentang laut yang baik, sehingga keahlian dan keterampilan yang terkait dengan masalah kelautan dapat di ajarkan kepada para siswa. Dengan uraian di atas maka penulis mengadakan penelitian tugas akhir dengan judul: "IMPLEMENTASI PROGRAM



## NELAYAN MASUK SEKOLAH DI KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING KABUPATEN PANGKEP”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalahh dalam penelitian ini adalah bagaimana Implemetasi Program Nelayan Masuk Sekolah di Kabupaten Pangkep?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah di Kabupaten Pangkep.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat teoritis**

Penelitian dapat menambah pengetahuan mengenai nelayan masuk sekolah di Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya.

#### **b. Manfaat praktis**

##### **1. Manfaat Untuk Mahasiswa**

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah

##### **2. Manfaat Untuk Pemerintah**

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan penelitian dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini diharapkan dalam penelitian ini dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara penelitian terdahulu dan peneliti yang dilakukan.

1. Dimas Alif Budin N. M. Saleh Socaidy. Minto Hadi (2013) Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar. Vol. 1 No 5. Dalam penelitian ini pemerintah membuat suatu program untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sebagai bekal usaha bekerja dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam program ini pemerintah membuat inovasi dalam menanggulangi permasalahan kekurangan guru yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kemaritiman kepada peserta didik.
2. Teguh Aris Munandar. Dadan Darmawan (2020) Implementasi Progrm Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Lontar Kabupaten Serang. Vol. 5 No 2. Dalam penelitian ini masyarakat nelayan menjadi sasaran dalam penelitian ini untuk memperbaiki kehidupan nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada seperti halnya budidaya rumput

laut. Sedangkan dalam penelitian ini nelayan dijadikan narasumber yang mengajarkan peserta didik tentang kemaritiman laut dan segala hal tentang nelayan. Dalam penelitian ini nelayan merupakan pelaksana kebijakan sedangkan peneliti sebelumnya nelayan merupakan sasaran program.

3. Sri Maryuni (2015) Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pontiana. Vol 10. No 1. Dalam penelitian ini teori yang digunakan dalam mengukur suatu keberhasilan program menurut Smith (dalam Tajhan, 2006: 37) dalam proses implementasi ada 4 variabel program yang didefinisikan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III yang menjelaskan ada 4 variabel dalam keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.
4. Fitriah Y. alim (2019) Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pembudidayaan Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Poso. Vol 12 No. 1. Dalam penelitian ini program bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pesisir dan budi daya ikan tidak berjalan efektif, dilihat dari sosialisasi program yang kurang sehingga penerima bantuan tidak memahami maksud dan tujuan program sedangkan dalam penelitian ini inovator melakukan sosialisasi sehingga tujuan program dapat dimengerti oleh pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan.

5. Moris Adidi Yogja, Dia Meirina Suri (2020) Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Vol 9 No 3. Dalam penelitian ini pengimplementasian program tidak berjalan efektif dikarenakan kurangnya sumber daya pengelolaan sehingga disarankan dapat melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pengelolaan sehingga mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya sedangkan dalam penelitian ini masih diperlukan sumberdaya manusia sehingga disarankan agar merekrut narasumber sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

## **B. Teori dan Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian Implementasi**

Harsono (2002:67) Implementasi adalah “suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka menyempurnakan suatu program” Hal sama yang disampaikan wahab (1997:79) mengatakan secara umum istilah implementasi berarti “pelaksanaan atau penerapan”. Istilah implementasi biasa di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan tertentu.

Implementasi merupakan suatu penerapan bentuk inovasi dalam bentuk tindakan praktis dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengetahuan , implementasi atau nilai dan sikap, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah

dianggap pasti, implementasi bias diartikan pelaksanaan dari kata bahasa inggris *implement* yang berarti melaksanakan.

Implementasi adalah suatu tindakan sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Lester dan Wtewart dalam kusumanegara 2010:97). Implementasi adalah sebuah tahapan yang dilaksanakan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. (Laswel dalam Purwanto dan Sulistyastuti 2015:17). Penggunaan istilah implementasi muncul ke permukaan beberapa dekade yang lalu. Implementasi merupakan bagian atau salah satu tahap dari proses besar bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan.

Meter dan Horn dalam Suratman (2017:25) implementasi merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah ataupun swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Jones dalam Nawawi (2009:131-132) mengemukakan implementasi merupakan kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan.

Sabatier dan Muzmania dalam suratman (2017:26) yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat

utama implementasi kebijakan ialah memahami apa seharusnya yang terjadi setelah program di rumuskan. Menurut Grindle dalam Mulyani (2016:47) imlementasi merupakan proses umum tindakan implementasi yang dapat diteliti pada tingkat program yang tertentu. Proses pelaksanaa kebijakan akan di mulai dari program kegiatan yang telah tersusun, dana telah siap dan di salurkan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016:134) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Grindle dalam Winarno (2016:135) menyatakan bahwa implementasi adalah pembentukan suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai suatu dampak dari kegiatan pemerintah.

## **2. Implementasi Kebijakan**

Pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983: 5) mengenai dua perspektif implementasi kebijakan yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik yang merupakan cara alternatif dalam mengimplementasikan kebijakan atau program. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan pada awalnya didasarkan pada bagaimana cara memenuhi aspek ketepatan dan keefisien.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam



praktiknya implementasi kebijakan yaitu suatu proses yang bagian kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politik karena wujudnya intervensi sebagai kepentingan (Agustiono, 2016:126). Berret dalam Agustiono (2016:128) implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan kedalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri. Menurut Oemar hamalik penulis buku yang berjudul Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, bahwa "Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap" implementasi adalah "put something into effect" atau penerapan sesuatu yang memberikan efek".Secara umum implementasi diartikan sebagai penerapan suatu kegiatan yang berdampak baik bagi pelaksananya.

menurut Wibawa (Tahir, 2014:58), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Nugroho (2014:657) menyatakan, "implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya". Selanjutnya menurut Grindle (Waluyo, 2007:49), "implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme

penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”. Kemudian menurut Mulyadi (2015:26), “implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”. Menurut Anderson (Tahir, 2014:56-57), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi.
- b. Hakikat proses administrasi.
- c. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
- d. Efek atau dampak dari implementasi.

Menurut Matland (Hamdi, 2014:98), “implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*topdown*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*)”. Sedangkan menurut Jones (Waluyo, 2007:50), “dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu:

- a. Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain,
- b. Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didamping implementasi”.

Menurut Matland (Hamdi, 2014:98) menambahkan, adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:

- a. Konflik rendah-ambigiutas rendah (implementasi administratif).
- b. Konflik tinggi-ambigiutas rendah (implementasi politis).
- c. Konflik tinggi-ambigiutas tinggi (implementasi simbolik).
- d. Konflik rendah-ambigiutas tinggi (implementasi eksperimental).

Selanjutnya menurut Edward III (Mulyadi, 2015:47), “tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat”.

### 3. Konsep kebijakan publik

Konsep Kebijakan Publik memiliki banyak definisi atau pengertian, Danim (2005: 20-23) memberikan pengertian kebijakan sebagai “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Pengertian ini menurutnya berimplikasi:

- a. bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

- c. bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- d. bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). Dalam pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara mengutip pendapat Friedrich mengartikan kebijakan: Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan, Friedrich (dalam Wahab, 2005: 3).

#### **4. Unsur-unsur implementasi kebijakan**

Unsur-unsur implementasi dalam Tachjan (2006:28) menjelaskan ada 3 unsur implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu

a. Unsur pelaksanaan

Unsur pelaksanaa adalah implementor kebijakan, sebagaimana yang di jelaskan Dimock dalam Tachjam (2006:28), mejelaskan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujaun dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

b. Adanya program yang di laksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

c. Target Group atau Kelompok Sasaran

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

## 5. Model-Model Kebijakan Publik

a. Berdasarkan teori Edward III dalam Subarson (2011:90-92)

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.



## 2) Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka pelaksanaan tidak berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

## 3) Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik.

## 4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *standard operating procedure* (SOP) dan fragmentasi.

### b. Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2016:100)

- 1) Standard dan sasaran kebijakan.
- 2) Sumberdaya.
- 3) Hubungan antar organisasi.
- 4) Karakteristik agen pelaksana.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
- 6) Disposisi implementor.

c. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn Van Meter dan Van Horn (Tahir, 2014:71-72) merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni

- 1) Standar dan sasaran kebijakn.
- 2) Sumberdaya
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
- 4) Karakteristik agen pelaksana.
- 5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
- 6) Sikap para pelaksana.

d. Model Merilee S. Grindle (Tahir, 2014:74) Implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuantujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Menurut Grindle mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan

- 5) Siapa pelaksana program
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan sumber daya tanggap pelaksana.

## 6. Pengertian pendidikan

John Dewey dalam Arifin (1995:70) Pendidikan adalah sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan (emosional) menuju kearah tabiat manusia dan manusia biasa. Mortiner J. Adler dalam Rosyadi (2004:35) Pendidikan adalah sebaga suatu proses dimana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan yang baik melalui sarana yang artistic dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang tetapkannya, yaitu kebiasaan yang baik. Langeveld adalah seorang ahli pendidikan bangsa belanda mrumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut: "pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan orng lain"

### C. Program Nelayan Masuk Sekolah

Mengenai hak dan kewajiban warga Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1-5. Pemerintah kabupaten pangkep mengikut pada undang-undang secara nasional sehingga pemerintah menetapkan suatu Program Nelayan Masuk Sekolah yang bertujuan untuk mengedukasi anak-anak nelayan atau peserta didik untuk terus bersekolah dalam meningkatkan angka partisipasi bersekolah daerah kepulauan.

Konsep program nelayan masuk sekolah di butuhkan untuk mengatasi kekurangan guru dengan melibatkan masyarakat nelayan untuk berkerja sama dengan sekolah yaitu dengan mengajarkan kemampuan skill tentang laut da cara membuat jaring. Manfaat dari program ini dapat mengedukasi anak-anak nelayan atau peserta didik untuk sekolah dalam mengurangi angka putus sekolah di kepulauan serta masyarakat dapat mengatasi kekurangan guru di daerah kepulauan.

**Tabel 2.2 Peta Stakeholder “Nelayan Masuk Sekolah”**

No	Stakeholder	Peran	Strategi komunikasi
1	Bupati kab. Pangkep	Kebijakan dan penandatanganan SK, serta lauching	Komunikasi non format, surat
2	Kepala dinas pendidikan	Kebijakan, persetujuan untuk prop- Er, ijin penugasan, serta pertemuan dengan pengawas kepala sekolah dan guru lauching	Komunikasi non format, surat
3	Sekretaris dinas pendidikan	Memfasilitasi pendataan, keterlibatan TIM kerja	Komunikasi non format, surat
4	Kepala bidan SD dan SMP	Memfasilitasi kegiatan pertemuan dengan kepala sekolah SD dan SMP di kepulauan, KKG dan MGMP	Komunikasi non format, surat



5	Kepala bidan GTK	Memimpin pertemuan TIM kerja dan pelaksanaan proper	Komunikasi non format, surat
6	Kasubag perencanaan	Menyiapkan data pendidikan	Komunikasi non format, surat
7	Staf dinas pendidikan	Sebagain tim kerja	Komunikasi non format, surat
8	Pengawas	Membimbing sekolah SD dan SMP dalam membangun kerjasama dengan nelayan, tim kerja, membuat materi pembelajaran berbasis kearifan lokal, melaksanakan bimtek, membantu menyusun kurikulum muatan lokal kepulauan	
9	Kepala sekolah	Membangun kerjasama dengan nelayan, membuat materi pembelajaran berbasis kearifan lokal, melaksanakan bimtek, membantu menyusun kurikulum muatan lokal kepulauan.	Komunikasi non format, surat
10	Guru	Berkerjasama dengan nelayan dalam menyusun pembelajaran sesuai kompetensi nelayan, melaksanakan bimtek	Komunikasi non format, surat
11	Siswa	Melakukan pembelajaran	Komunikasi non format, surat

#### D. Kerangka Pikir

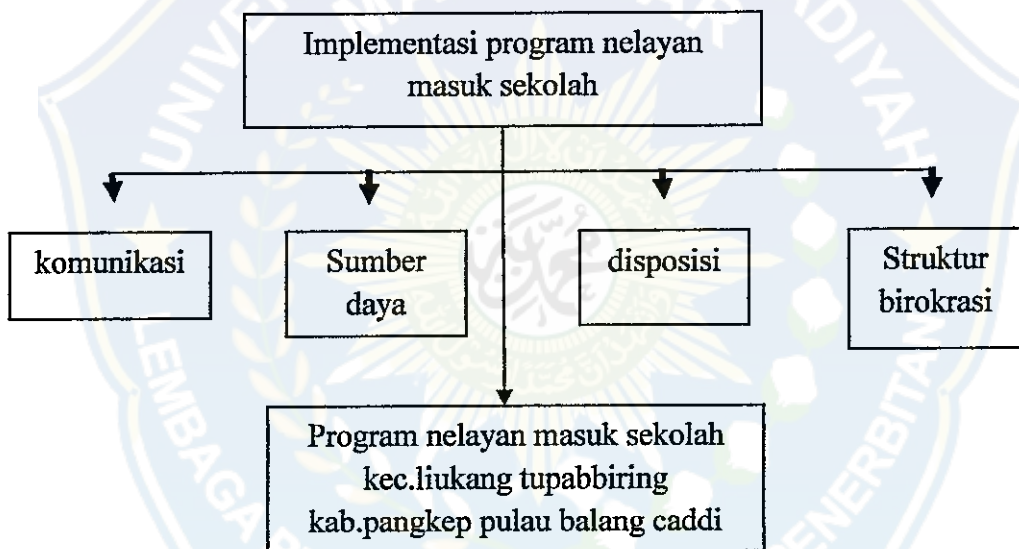
Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran yang diambil dari suatu teori, undang-undang atau peraturan yang dianggap relevan dengan fokus atau judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penelitian tersebut.

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah di Kabupaten Pangkep. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program nelayan masuk sekolah, maka penelitian ini akan dianalisis menggunakan Peraturan daerah Kabupaten Pangkep dan



Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, kemudian di uji dengan menggunakan teori implementasi dari Edward III yang terdiri dari 4 indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menngambarkan kerangka pikir yang menjadi acuan sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**

#### **E. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang yang dirumuskan dalam rumusan masalah kemudian dikaji berdasarkan teori yang ada dalam tinjauan pustaka. Maka fokus penelitian mengenai bagaimana Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep. Peneliti saat ini melakukan analisis dengan menggunakan teori dari Edward III.

Berdasarkan kerangka pikir diatas, keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir, dan tercapai tidaknya tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan suatu program dalam hal ini yakni, Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep dalam pelaksanaan program nelayan masuk sekolah. Keberhasilan implementasi dapat diukur dari empat indikator hal berdasarkan pada teori Edward III dala subarsono (2011:90-92) sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga bias mengurangi distorsi implementasi.

#### 2. Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusiis, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

#### 3. Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan

kebijakan dengan bik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuatan kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *standard operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

### F. Deskripsi Fokus Penelitian

Menurut Edward III dalam Subarsono (2011;90-92) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variable, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Keempat variable ini saling berhubungan satu sama lain.

#### 1. Komunikasi

Implementasi yang efektif diperlukan komunikasi agar setiap individu dapat mengetahui tujuan suatu program. Pelaksana juga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga tujuan program dapat tercapai.

## 2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas dan memerlukan sumberdaya anggaran sehingga Implementasi Nelayan Masuk Sekolah Di Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep berjalan dengan efektif.

## 3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik serta respon pelaksana terhadap implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah Di Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan tiang pelaksanaan suatu program agar setiap pelaksana program mengetahui fungsi atau tugas masing-masing sehingga tidak terjadi hambatan dalam pengimplementasia Program Nelayan Masuk Sekolah Di Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan lokasi penelitian**

Penelitian di lakukan tanggal 3 Oktober sampai 3 November yang di laksanakan di Kab. Pangkep dan Kepulauan terkhusu di pulau pulau Balang Caddi. Peneliti mengambil lokasi ini untuk di teliti agar mengetahui bagaimana implementasi program tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

##### **B. Jenis dan tipe penelitian**

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan penulis sebagaimana yang dijelaskan dalam Sugiyono (2017), sebagai berikut:

###### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses berlangsungnya Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah Di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.

###### **2. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk menelaah, menganalisis, dan menjelaskan lebih dalam bagaimana Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah Di Kabupaten Pangkep sejauh mana Nelayan Masuk Sekolah mengatasi permasalahan pendidikan di Kabupaten Pangkep.



### C. Sumber Data

Sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder

#### 1. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang menyangkut tentang implementasi program nelayan masuk sekolah di Kabupaten Pangkep.

#### 2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil atau bersumber dari dokumen, laporan, artikel dan buku referensi yang bersangkutan dengan masalah yang akan di teliti.

### D. Informan

Pemilihan informan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu memilih orang yang mengerti dan terlibat kedalam permasalahan Program Nelayan Masuk Sekolah. Berikut daftar Informan dalam penelitian ini:

**Table 3.1 Informan Penelitian**

No	Jabatan Informan	Nama/Inisial Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Guru dan Pendidikan	Rukmini, S.Pd.,M.Pd (RK)	1
2	Guru muatan lokal	Andi Asriono S.Pd (AA)	1
3	Guru seni budaya	Febiola S.Pd (FB)	1
4	Pengawas	Hamsah S.Pd.I	1
5	Nelayan	Subiha (SB)	1
6	Nelayan	Haya (HY)	1
7	Masyarakat	Sakka (SK)	1

8	Murid	Babiah (BB)	1
JUMLAH		8 ORANG	

*Sumber:peneliti/penulis*

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017), yaitu sebagai berikut:

#### **1. Observasi ( pengamatan )**

Untuk melihat pelaksanaan nelayan masuk sekolah di Pulau Balang Caddi. Maka peneliti melakukan pengamatan dan mencatat langsung hal-hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Peneliti akan turun langsung ke lapangan dalam hal ini SMPN 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING untuk mengamati apakah Program Nelayan Masuk Sekolah tersebut sudah terlaksana atau tidak.

#### **2. Wawancara ( interview )**

Tehnik wawancara yang dilakukan menggunakan Tanya jawab langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian . serta mencatat daftar pertanyaan yang di butuhkan dan telah disiapkann peneliti.

#### **3. Dokumentasi**

Metode ini akan dilakukan dengan cara mendatangi SMPN 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING untuk memperoleh data berupa tulisan, gambar dan karya-karya tentang proses pelaksanaan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam analisis data, penulis menggunakan 3 (tiga) teknik sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017:247-252), yaitu:

### **1. Reduksi Data (data reduction)**

Tahap ini penulis mencoba memilih data-data yang sesuai atau data yang bersifat pokok untuk selanjutnya dirangkum dan memfokuskan pada hal yang dianggap penting guna mempermudah dalam menggunakan pola penelitian yang diinginkan.

### **2. Penyajian data (data display)**

Merupakan sajian data yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk narasi singkat dengan menjelaskan berbagai hubungan yang ada pada tiap-tiap kategori serta melampirkan dalam sebuah bentuk bagan.

### **3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification)**

Pada tahap ini kesimpulan yang diperoleh oleh penulis masih bersifat sementara sampai ditemukannya bukti dan data yang kuat untuk digunakan pada tahap berikutnya.

## **G. Teknik Pengabsahan Data**

Menurut Wiersma dalam Sugiyono (2017:274), Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2017:274), membagi triangulasi kedalam tiga macam, yaitu:

### 1. Triangulasi Sumber

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang didapatkan dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti melakukan perbandingan dari hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

### 2. Triangulasi Teknik

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat

narasumber masih segar, belum terlalu banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih meyakinkan. Untuk itu dalam rangka menguji kredibilitas data bisa dilakukan melalui teknik melaksanakan pemeriksaan dengan wawancara, pengamatan atau bisa cara lain dengan keadaan yang lain. Jika hasil uji mendapatkan data yang tidak sama, maka dilaksanakan dengan berulang-ulang hingga sampai didapatkan kepastian suatu datanya





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang gambaran umum dan kondisi sekolah SMP NEGERI 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING dipulau balang caddi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan jumlah siswa

##### 1. Profil Sekolah

Nama Sekolah: SMP NEGERI 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING

NPSN : 40316762

Jenjang Pendidikan: SMP

Alamat Sekolah: Pulau Balang Caddi

RT/RW: 1/1

Kode Pos: 90671

Kelurahan: Mattiro Langi

Kecamatan: Kecamatan Liukang Tupabbiting

Kabupaten: Pangkajene dan Kepulauan

Posisi geografis: -4.9422208 lintang. 199.4202662 bujur

## 2. Latar belakang Nelayan Masuk Sekolah

Secara demografi di Kepulauan Kabupaten Pangkep pada umumnya mata pencaharian masyarakat 90% adalah nelayan, nelayan memiliki potensi tentang kelautan yang tidak diragukan lagi, baik membaca tanda-tanda alam kepulauan, Teknik, strategi mengolah laut dan pembuatan alat penangkapan ikan maupun pengolahan hasil laut, ini merupakan potensi yang besar yang dapat dimanfaatkan sekolah sebagai sumber belajar dan tenaga pengajar di sekolah khususnya muatan lokal kelautan. Potensi nelayan yang ada di kepulauan ini belum terjadi sinergitas dengan pihak sekolah, sehingga peran serta masyarakat nelayan ke sekolah masih rendah'. Tujuan Nelayan Masuk Sekolah adalah "Meningkatkan peran serta masyarakat nelayan dalam pembelajaran muatan lokal di sekolah"

Program Nelayan Masuk Sekolah berawal dari Inovasi Implementor saat mengikuti diklatpim III angkatan II kabupaten pangkep dalam meningkatkan layanan pendidikan di daerah kepulauan. Dalam hal inovator mengaku bahwa Pangkep khususya daerah kepulauan masih kekurangan guru sehingga dibuatkan program dengan melibatkan masyarakat nelayan berkerjasama dengan sekolah.

Program nelayan masuk sekolah merupakan program pemberdayaan masyarakat nelayan yang ada di gugusan pulau-pulau uantuk mewarisi value, pengetahuan dan keterampilan kemaritiman kepada anak didik. Nelayan masuk sekolah merupakan paguyuban masyarakat nelayan yang

merupakan bagian integral dari komite sekolah yang dapat memberikan pembelajaran di sekolah secara terencana dan terprogram.

Proram nelayan masuk sekolah juga diharapkan dapt membantu sekolah dalam mengatasikesenjangan kekurangan guru, baik secara permanen maupun secara parsial yang disebabkan ketidak hadiran gurunkarena faktor geografis.

### 3. Tujuan dan Manfaat Program

#### a) Tujuan

##### 1) Tujuan jangka pendek

- a) Terselenggaranya program “Nelayan Masuk Sekolah” pada 3 pulau di Kecamatan Liukang Tupabbiring di tingkat SD dan SMP
- b) Terbentuknya Komunitas Nelayan Masuk Sekolah di 3 pulau di Kecamatan Liukang Tupabbiring
- c) Terbentuknya silabi dan materi pembelajara program “Nelayan Masuk Sekolah” berbasis kepulauan di tingkat SD dan SMP

##### 2) Tujuan Jangka Menengah

Tersedianya regulasi yang mendukung program “Nelayan Masuk Sekolah”

##### 3) Tujuan Jangka Panjang

Tereplikasinya program “Nelayan Masuk Sekolah” di daerah kepulauan Pangkep

b) Manfaat

- 1) Menurunkan angka putus sekolah sehingga partisipasi bersekolah meningkat yang dapat meningkatkan pelayanan dalam pembelajaran
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat secara kontekstual pada tingkat SD dan SMP di Kepulauan dan di Kabupaten Pangkep
- 3) Mengatasi kekurangan guru di sekolah pada tingkat SD dan SMP di Pulau Kabupaten Pangkep
- 4) Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah pada sekolah tingkat SD dan SMP di Pulau Kabupaten Pangkep
- 5) Meningkatkan pemahaman nelayan terhadap pentingnya pendidikan
- 6) Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis kearifan lokal di daerah kepulauan
- 7) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mengelola laut
- 8) Membantu sekolah dalam mengatasi kekurangan guru dalam kesenjangan yang sifatnya persial ataupun permanen
- 9) Meningkatkan mutu pelayanan dan mutu proses pembelajaran

4. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan program Nelayan Masuk Sekolah dilaksanakan dengan tahapan

- 2) Membangun Kerjasama

Sekolah diharapkan dapat membangun kerjasama dengan orang tua siswa, komite sekolah, alumni dan masyarakat dalam bentuk menyusun profram bersama untuk pembelajaran yang di rencanakan bersama sekolah

### 3) Membelajarkan

Pengawas, alumni, siswa dan masyarakat melakukan pembelajaran sekolah sesuai dengan program yang telah disusun bersama dengan sekolah berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat, komite dan alumni atau sekolah dan masyarakat dimana mereka berada antara lain. Membelajarkan materi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat, alumni, siswa sesuai keahlian yang dimiliki.

### 4. Mengesplorasi

Pembelajaran yang diberikan dari partisipasi masyarakat dikembangkan dalam bentuk adanya program ataupun kemampuan siswa dalam mempraktekkan atau mendemostrasikan dalam bentuk hasil kerja sama yang dapat dilihat, yang diharapkan siswa dapat memiliki keahlian atau keterampilan. Yang dapat di kembangkan di tempat tinggalnya.

### 5. Langkah-langkah pelaksanaan program kegiatan

- a. Menyusun kurikulum muatan lokal
- b. Menyusun meteri pembelajaran
- c. Membuat bahan ajar



d. Melaksanakan bimtek

e. Implementasi

6. Kesesuaian Kategori

Inovasi Nelayan Masuk Sekolah (NMS) terkait dengan kategori Pendidikan karena inovasi ini berupaya agar sekolah dapat membangun kerjasama dengan orang tua siswa, komite sekolah alumni, dan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dalam bentuk menyusun program bersama untuk pembelajaran muatan lokal kelautan, yang direncanakan bersama di sekolah, sehingga dapat mengatasi kekurangan guru khusus muatan lokal. Inovasi ini memberdayakan Nelayan sebagai pengajar atau narasumber dalam pembelajaran muatan lokal kelautan.

7. Kontribusi terhadap Capaian Nasional Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas social agar mereka bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Yaitu:

- a. menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan.

- b. secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, dengan keterlibatan nelayan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dapat menjadi guru yang berkualitas sesuai dengan bidangnya.

## 8. Deskripsi Inovasi

Program “Nelayan Masuk Sekolah” merupakan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan yang ada di Gugusan Pulau-Pulau untuk mewariskan Value, Pengetahuan dan Keterampilan Kemaritiman kepada Peserta Didik. Nelayan Masuk Sekolah Paguyuban Masyarakat Nelayan yang merupakan bagian Integral dari Komite Sekolah yang dapat memberikan Pembelajaran di sekolah secara terencana dan terprogram. Untuk pelaksanaan Nelayan Masuk Sekolah melalui tahapan :

- a. Melakukan pendataan skill nelayan dan seleksi sebagai tenaga pengajar yang akan diberdayakan sesuai kebutuhan di setiap pulau.
- b. Membangun Kerjasama Menyusun perangkat pembelajaran.
- c. Proses Membelajarkan.
- d. Evaluasi pelaksanaan

## 9. Inovatif (Kebaruan, Nilai Tambah, atau Keunikan)

Kebaruan Inovasi ini yaitu Pemberdayaan Masyarakat nelayan sebagai narasumber mata pelajaran muatan lokal di sekolah yang ada di kepulauan. Karena selama ini pembelajaran dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran yang bukan background muatan lokal kelautan. Inovasi ini memanfaatkan potensi pengetahuan, keterampilan dan

Kemampuan skill dari nelayan yang diperoleh secara alami agar dapat dibagi ke peserta didik.

#### 10. Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada Konteks/tempat lain)

Inovasi ini dikembangkan pertama kali di daerah kepulauan yaitu di Pulau Balang Caddi Kec.Liukang Tupabbiring dengan melibatkan siswa SD yaitu SDN Balang Caddi dengan jumlah siswa sebanyak 125 orang dan SMP 8 Satap Tupabbiring dengan jumlah siswa sebanyak 80 orang, dan nelayan yang terpilih sebanyak 2 orang dengan kemampuan yang berbeda. Selanjutnya telah dikembangkan di 2 pulau yaitu pulau Sanane dan Pulau Podang-Podang dengan cakupan siswa sebanyak 241 pada 2 SD (SDN 33 Sanane, SDN 14 Podang-Podang) dan 172 siswa pada 2 SMP (SMP 8 Satap liukang Tupabbiring dan SMP 11 Satap Tupabbiring). dan alat juga tersedia di nelayan sesuai potensi dan skillnya di pulau.

#### 11. Strategi Keberlanjutan

Untuk menjamin keberlanjutan Inovasi Nelayan Masuk Sekolah maka upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan melalui pemda untuk melahirkan peraturan Bupati tentang Nelayan Masuk Sekolah, sehingga semua sekolah yang ada di kepulauan menerapkan inovasi ini dengan melibatkan pengawas sekolah sebagai mediator antara sekolah dengan orang tua siswa nelayan sebagai tenaga pengajar atau narasumber dalam pembelajaran muatan lokal kelautan.

#### 12. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

- a. Dinas Pendidikan: Mendukung secara Lembaga, memfasilitasi dan Menyusun regulasi-regulasi pelaksanaan, Menyusun alokasi anggaran
- b. Kepala sekolah: Memfasilitasi nelayan yang berpotensi memberikan pembelajaran.
- c. Pengawas sekolah: Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembelajaran baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatannya dan melakukan supervise proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan instrument supervise pembelajaran.
- d. Kepala Desa : Memberikan dukungan izin kegiatan, Fasilitas dan pengalokasian anggaran ADD.
- e. Guru : Menyusun perangkat pembelajaran bersama nelayan mulai dari silabus, Program pengajaran, RPP, dan alat evaluasi.

## **B. Hasil Penelitian**

### **Implementasi program nelayan masuk sekolah**

Kebijakan pelaksanaan program nelayan masuk sekolah yang berdasar pada UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang mengatur tentang pendidikan menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dilanjut dalam pasal 31 ayat (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dimana pelaksanaan aktivitas atau kegiatan, pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hakekat dari implementasi merupakan suatu kegiatan



yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksanaan dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan otoritas yang berwenang. Hal ini diungkapkan oleh Mazmania dan Sabatier dalam bukunya *Implementatoin and Publik Policy* pada tahun 1983 “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya, keputusa tersebut mendefinisikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. (Agustiono,2006:154)

Bentuk kegiatan implementasi dari pemerintah tenger nelayan masuk sekolah adalah dengan melakukan pelaksanaan program dengan mengikut sertakan masyarakat nelayan yang sebelumnya masyarakat nelayan hanya bekerja sebagai pelaut.Kebijakan tersebut agar masyarakat tau bahwa nelayan mempunyai skill yang dapat dipelajari oleh peserta didik disekolah.

Peneliti melakukan sesi wawancara kepada informan yaitu Inovator kebijakan, bagaimana menurut ibu tentang program nelayan masuk sekolah, sedang kita ketahui bahwa setiap harinya nelayan hanya memancing atau menangkap ikan, mengatakan:

“Nelayan memiliki pengetahuan yang baik tentang laut, nelayan tentu tahu bagaimana membuat jaring, memperbaiki mesin, melihat cuaca, membuat kapal, bagaimana cara berenang dengan baik dan pengetahuan-pengetahuan tentang laut lainnya yang ia pelajari secara otodidak. Dengan kemampuan tersebut, nelayan mampu membagikannya atau mengajarkannya kepada peserta didik di sekolah sehingga dikatakan



nelayan masuk sekolah”(Hasil wawancara RM, tanggal 23 september 2021)

Sedangkan dalam sesi wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru.

Bagaimana menurut bapak tentang program nelayan masuk sekolah, mengatakan:

“menurut saya program ini bagus, karena anak-anak disini selalu diarahkan oleh orang tuanya untuk pergi bagang supaya ada uang belanjanya, sedangkan kalau pergi bagang tidak masuk sekolah, jadi adanya program ini murid bisa belajar cara buat umpang atau buat jaring agar bisa buat sendiri di rumah terus dijual, jadi tidak perlu lagi pergi bagang” (Hasil wawancara FB, tanggal 7 Oktober)

Sedangkan menurut warga, mengatakan

“bagus karena belajark tentang laut sama pembuatab umpang, apalagi ibu subi pintar dalam membuat umpang sama jaring” (Hasil wawancara SK, tanggal 4 November)

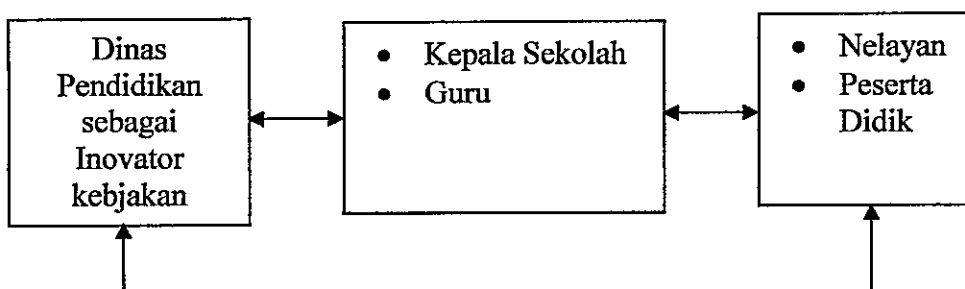
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya nelayan masuk sekolah di pulau, nelayan bisa mengajarkan kepada siswa pengetahuan tentang laut dan cara-cara untuk melaut sehingga siswa dapat mengetahui skill-skill apa saja yang digunakan nelayan untuk menjaring ikan dilaut.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi program nelayan masuk sekolah adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards. Menurut pandangan Edwards III ada empat faktor yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor kebijakan yang dapat berpengaruh pada implementasi program nelayan masuk sekolah adalah sebagai berikut

## 1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran dan tujuan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting memberi perhatian besar kepada ukuran dan tujuan kebijakan, ketetapan komunikasi dengan para pelaksana di sekolah. Semakin baik koordinasi komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, serta yang bertanggung jawab dalam menjalankan program. Maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Aspek dari komunikasi merupakan keputusan kebijakan nelayan masuk sekolah, petunjuk pelaksanaan, pemerintah dan lain-lain. Komunikasi yang terjadi antar dinas pendidikan yaitu inovator kebijakan, kepala sekolah, kekomite kebijakan, nelayan dan peserta didik. Dalam komunikasi ini bertujuan agar mereka mengetahui apa-apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan guna dalam mencapai tujuan program nelayan masuk sekolah. Arus komunikasi yang terjadi dalam implementasi program nelayan masuk sekolah dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 4.1 Arus Komunikasi**

Arus komunikasi di atas menggambarkan bagaimana komunikasi antara dinas pendidikan dan sekolah dilakukan agar informasi yang diberikan lebih jelas dan diharapkan tidak terjadi perbedaan pendapat antar pembuat kebijakan dan pelaksana.

Peneliti melakukan sesi wawancara dengan inovator bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program nelayan masuk sekolah, mengatakan:

“komunikasi yang saya lakukan dalam pelaksanaan program nelayan masuk sekolah itu dengan berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah dan awal-awalnya saya ke pulau untuk melakukan sosialisasi tentang nelayan masuk sekolah, merubah pola pikir masyarakat nelayan, pentingnya pendidikan, disini lain nelayan juga memiliki kemampuan tentang laut yang sangat baik yang dapat di ajarkan ke anak- anak di sekolah” (Hasil wawancara RK, tanggal 23 September 2021)

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Memang banyak yang bertanya tentang bagaimana nelayan masuk sekolah karena pada dasarnya nelayan bekerja di laut dan kita mengajak mereka ikut serta dalam mendidik siswa. Sebagai anak pulau, mereka juga mengetahui tentang skill-skill kelautan” (Hasil wawancara RK. Tanggal 23 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa kita lihat komunikasi yang dilakukan inovator dalam pelaksanaan nelayan masuk sekolah sangat baik, dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat, merubah pola pikir masyarakat atau orang tua siswa bahwa pementingkan pendidikan dibanding dengan membiarkan anaknya ikut mencari ikan.

Dilanjutkan dengan sesi wawancara dengan guru. Dalam pelaksanaan program nelayan masuk sekolah bagaimana komunikasi sekolah dengan nelayan, mengatakan:

“kita kerumah nelayan, bertanya kepada nelayan kapan ada waktunya untuk mengajar karena kita tidak tau kapan ada waktunya, karena kita tau nelayan haruski kelaut cari uang jadi harus ada info dari nelayan kapan ada waktunya mengajar barulah kita gerakkan anak-anak kerumahnya” (Hasil wawancara AA, tanggal 8 Oktober)

Sedangkan dalam sesi wawancara dengan salah satu nelayan. Bagaimana komunikasi bapak dengan sekolah dalam pelaksanaan nelayan masuk sekolah, mengatakan:

“kalau dalam mengatur jadwal kapan saya bisa mengajar, saya tidak bisa tentukan karena saya biasa tidak adaka di pulau karena saya pergi sawakung (bermalam di laut untuk cari ikan) jadi tidak pasti kapan saya ada dipulau, jadi kalau saya pulang, saya infokan guru sehingga siswa bisa datang kerumah dan saya bisa langsung mengajar. (Hasil wawancara HY, tanggal 8 Oktober)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah di perlukan komunikasi yang baik antara inovator, sekolah dan nelayan. Dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat makan masyarakat lebih gampang untuk mengerti bagaimana pentingnya pendidikan. Nelayan yang mempunyai skill dan ilmu kemaritiman yang sangat baik dapat diajarkan ke anak didik agar mampu pengetahui muatan lokal yang dimiliki pulau balang caddi. Dalam pelaksanaan program nelayan masuk sekolah sekolah, sekolah belum mampu menetapkan jadwal pelaksana dikarekan



nelayan yang harus mencari nafka di laut sehingga jadwa pelaksana belum bisa di tetapkan sehingga pelaksanaan program sedikit terkendala.

Berikut pernyataan dari sesi wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program nelayan masuk dapat berjalan, mengatakan:

“kita selalu sosialisasikan kepada masyarakat nelayan dan siswa supaya lebih memahami manfaat dari program nelayan masuk sekolah, jadi Program Nelayan Masuk Sekolah bisa berjalan sampai sekarang. (Hasil wawancara FB, tanggal 8 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah guru mensosialisasikan kepada masyarakat nelayan dan peserta didik apa manfaat dan tujuan program Nelayan Masuk Sekolah sehingga masyarakat mampu memahami dan pelaksanaan program Nelaya Masuk Sekolah dapat berjalan sampai sekarang.

## **2. Sumber daya**

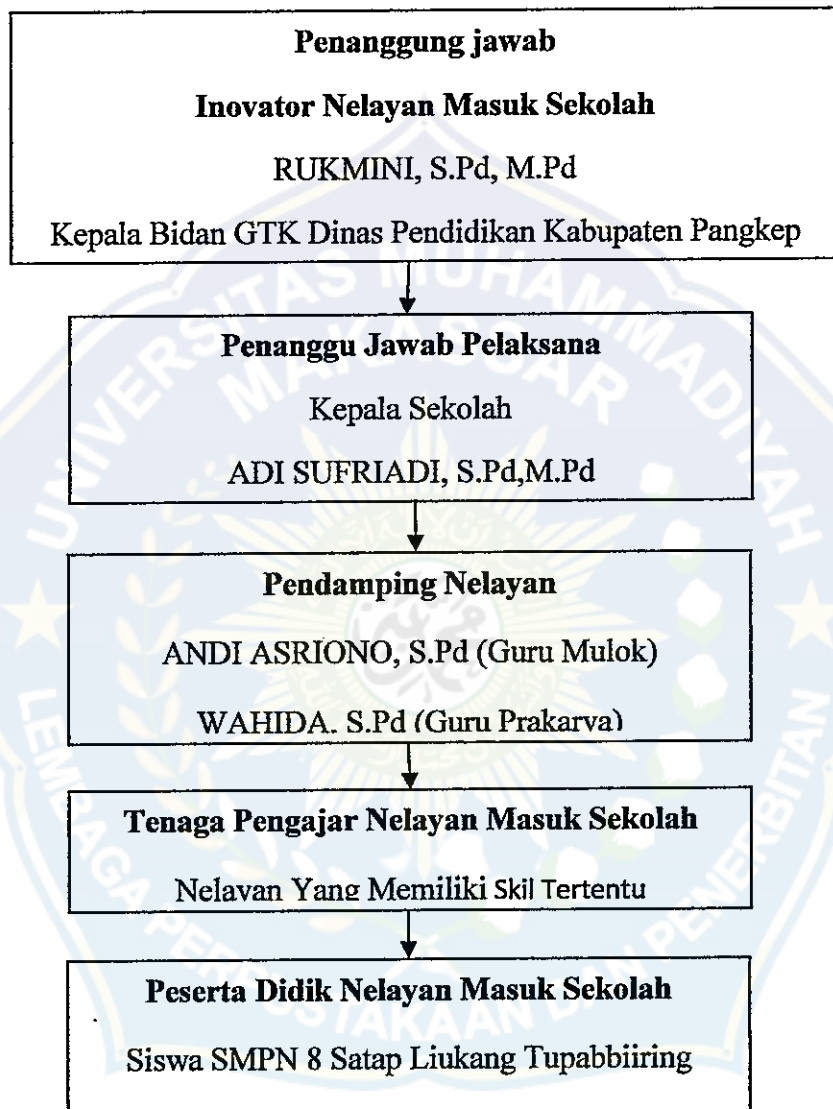
Sumber daya merupakan faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, implementasi kebijakan memerlukan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

### **a. Sumber daya manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting bahkan tidak lepas dari pelaksanaan kebijakan. Dalam pemilihan sumber daya manusia yang gunakan merupakan sumber daya yang memiliki kemampuan atau keahlian.



**STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM NELAYAN MASUK  
SEKOLAH SMPN 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING**



**Gambar 4.2 STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM NELAYAN  
MASUK SEKOLAH SMPN 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING**

Tugas-tugas pelaksanaan progam nelayan masuk sekolah

- 1) Dinas Pendidikan: Mendukung secara Lembaga,  
memfasilitasi dan Menyusun regulasi-regulasi pelaksanaan,  
Menyusun alokasi anggaran

- 2) Kepala sekolah: Memfasilitasi dan memediasi komite dan anggota komite atau nelayan yang berpotensi memberikan pembelajaran.
- 3) Pengawas sekolah: Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembelajaran baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatannya dan melakukan supervise proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan instrument supervise pembelajaran.
- 4) Guru: Menyusun perangkat pembelajaran bersama nelayan mulai dari silabus, Program pengajaran, RPP, dan alat evaluasi.
- 5) Nelayan: mengajarkan peserta didik tentang skill yang dimiliki dan kemampuan otodidak yang dimiliki.

Program Nelayan Masuk Sekolah memiliki struktur organisasi yang jelas. Pada struktur organisasi tersebut diketahui bahwa untuk jajaran direksi mulai dari inovator sampai peserta didik. Dilihat dari sesi wawancara peneliti dengan inovator kebijakan. Bagaimana tahapan dalam pemilihan narasumber, mengatakan:

“Waktu sosialisasi nelayan masuk sekolah sekalian didiskusikan sama masyarakat siapa yang bagus dijadikan narasumber terus masyarakat menyebutkan beberapa nelayan, selebihnya kita serahkan ke sekolah untuk memilih siapa yang benar-benar ahli dalam hal ini”(Hasil wawancara RK, tanggal 23 September)

Berdasarkan hasil wawancara di atas inovator menjelaskan bagaimana tahap pemilihan narasumber, dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pemilihan narasumber yang secara tidak langsung sudah dijelaskan dalam tahapan pelaksanaan, poin pertama

membangun kerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

Dilanjut dengansesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada guru. Bagaimana sekolah memilih nelayan untuk dijadikan narasumber, mengatakan:

“kita cari nelayan yang betul-betul bisa jadi narasumber nelayan masuk sekolah dan dapat rekomendasi dari beberapa masyarakat untuk dijadikan narasumber dan kami memilih Dg.Haya dan istrinya Gg.Subi untuk di jadikan narasumber karena mereka memiliki kemampuan yang dapat diajarkan di sekolah. Ini bapak sudah lama kerjanya begini terus dia memeng ahli dari beberapa nelayan” (Hasil wawancara FB, tanggal 7 Oktober 2021)

Sedangkan dari hasil wawancara dengan salah satu nelayan sekaligus narasumber nelayan masuk sekolah. Bagaimana proses bapak sehingga tertarik menjadi narasumber nelayan masuk sekolah, mengatakan:

“awalnya kepala sekolah mendatangi kerumah saya lalu bercerita tentang nelayan masuk sekolah, lalu ditanya apakah saya siap jadi narasumber, kita yang ajarki anak-anak buat jaring atau pembuatan umpang terus saya menjawab iya karena menurut saya bagus,bisa saling berbagi ke anak sekolah” (Hasil wawancara HY, tanggal 8 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa disimpulkan dalam pemilihan sumber daya manusia, sekolah memilih narasumber yang sudah didiskusikan dengan masyarakat dan dipilih oleh sekolah. Sumberdaya manusia yang dipilih merupakan narasumber yang ahli dalam hal kelautan dan yang dapat diajarkan kepada peserta didik sehingga tujuan program dapat tercapai.

Peneliti melakukan sesi wawancara dengan salah satu murid. Apakah menurut adek Dg.Subi sama Dg. Haya merupakan narasumber yang tepat, mengatakan:

“menurutku kak bagus sekalimi karena dia disini paling jago apalagi buat umpan sama jarring, pulang seberang saja kalau mau belli umpan di Dg. Haya, bagus sekali carana. Mungkin itumi dipilih karena memang jago sekali” (Hasil wawancara BB, tanggal 8 Oktober 2021)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas siswa juga mengatakan narasumber yang dipilih merupakan narasumber yang tepat karena Dg.Subi dan Dg.Haya sudah merupakan ahli yang ada di Pulau Balang Caddi dan sudah diakui oleh masyarakat disana.

#### b. Sumber daya anggaran

Dari hasil wawancara dilakukan dengan inovator pelaksana, darimana sumber daya anggaran yang diambil dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah, mengatakan:

“Sumberdaya anggaran diambil dari dana BOS yang ada di sekolah, setiap kali pembelajaran itu RP. 100.000. Pendanaan rutin diadakan sampai sekarang ini sepanjang dana BOS di sekolah masih ada dan masuk dialokasi pembiayaan proses pembelajaran. Bahan dan alat juga tersedia di nelayan sesuai potensi dan skillnya di pulau” (Hasil wawancara RM, tanggal 23 September)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan inovator, sumber daya anggaran diambil dari dana BOS dengan jumlah Rp 100.000 setiap pembelajaran untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah.

Sedangkan dalam sesi wawancara yang dilakukan dengan Guru. Apakah ada fasilitas yang disediakan sekolah untuk pelaksanaan nelayan, mengatakan:

“tidak ada fasilitas yang diberikan sekolah, kita hanya antar saja anak-anak kesini nanti nelayan yang siapkan apa-apa yang diperlukan untuk mengajar anak-anak.” (Hasil wawancara AA, tanggal 8 Oktober)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru, sekolah tidak menyediakan fasilitas kepada nelayan, sekolah hanya mengarahkan peserta didik ke rumah nelayan untuk pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah.

Dilanjut dengan sesi wawancara yang dilakukan nelayan, apakah sekolah menyediakan fasilitas pengajaran, mengatakan:

“Sekolah tidak mempersiapkan fasilitas pengajaran, saya pake alat sendiri kalau siswa mau diajar datang saja kesini nanti saya ajar”(Hasil wawancara HY, tanggal 8 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber, anggaran yang di ambil dari dana BOS belum terealisasi ke narasumber sehingga tidak ada fasilitas atau intensif yang diberikan kepada narasumber. Fasilitas yang digunakan merupakan alat yang dimiliki nelayan bukan dari sekolah, sehingga nelayan tidak fokus dalam pelaksanaan karena harus mencari nafka.

Dilanjut dengan sesi wawancara dengan nelayan. Apakah bapak sama ibu tidak keberatan kalau tidak ada fasilitas yang diberikan dari sekolah, mengatakan:



“Kalaupun saya tidak masalah kalau tidak ada fasilitas dari sekolah yang penting anak-anak mau di ajar, baru saja tidak sibukja”(Hasil wawancara SB, tanggal 8 Oktober 2021)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah diperlukan anggaran sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dan tujuan program dapat tercapai.

### **3. Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Disposisi merupakan faktor ketiga dalam mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Disposisi adalah sikap atau karakteristik yang dimiliki pelaksana kebijakan.

Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru. sikap pelaksana kebijakan dan hambatan dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah, mengatakan:

“sebelum siswa di arahkan kerumah nelayan saya jelaskan dulu apa-apa yang perlu diperhatikan dan harus di catat, jadi sampai di rumah nelayan siswa sudah tau apa yang harus dilakuka, sedangkan hambatannya siswa kadang tidak mengerti jadi kita kenelayan lagi untuk dijelaskan kembali”(Hasil wawancara AA, tanggal 8 Oktober)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pelaksanaan kebijakan sangat berpengaruh sikap para pelaksana dalam pelaksanaan guru memberikan penjelasan kepada peserta didik sebelum dilakukan pelaksanaan program nelayan masuk sekolah, sehingga peserta didik mampu mengetahui apa-apa yang harus dilakukan. Sedangkan hambatan pelaksanaan kebijakan siswa tidak mengerti sehingga perlu dijelaskan ulang agar siswa lebih paham.

Dari sesi wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru, sikap pelaksana kebijakan dan hambatan dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah, mengatakan:

“saya sangat setuju dengan Program Nelayan Masuk Sekolah karena adanya Program ini dapat mengatasi kekurangan guru yang ada di sekolah, apalagi di sini hampir semua guru bukan asli sini jadi kalau misalnya ada salah satu guru yg tidak datang karena alasan kondisi cuacayang kurang baik jadi tidak kepulau untuk mengajar jadi bisa dialihkan pelaksanaan Nelayan Masuk Sekolah”(Hasil wawancara SR, tanggal 7 Oktober 2021)

Beliau juga menambahkan, bahwa:

“hambatan pelaksanaanya itu kadang nelayan susah ditetapkan jadwalnya kapan bisa mengajar karena pergi juga melaut terus ada juga beberapa siswa yang disuruh sama orang tuanya pergi bagang jadi kadang beberapa siswa tidak ikut pelaksanaan program nelayan masuk sekolah”(Hasil wawancara FB, tanggal 7 Oktober)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya Program Nelayan Masuk Sekolah di Pulau Balang Caddi dapat mengatasi kekurangan guru yang ada di Pulau. ketika salah satu guru berhalangan hadir maka sekolah dapat mengisi dengan pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah. Sedangkan hambatan yang ditemukan adalah tidak adanya jadwal yang tetap dan beberapa siswa tidak ikut pelaksanaan karena harus pergi bagang.

Dilanjut dari sesi wawancara yang dilakukan peneliti dengan nelayan. Bagaimana sikap dalam menanggapi siswa yang sulit dalam memahami pelajaran, mengatakan:

“kalau ada siswa yang tidak menegerti saya kasi contoh, pada saat siswa diberikan contoh akan lebih paham. (Hasil wawancara SB, tanggal 8 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah Nelayan yang merupakan narasumber akan menjelaskan cara membuat jarring, umpan ikan dan cara melihat kondisi laut. Dalam hal ini ketika ada peserta didik yang tidak menegrti nelayan akan menjelaskan kembali atau memberikan contoh agar peserta didik paham apa yang dijelaskan.

Dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah diperlukan insentif yang diberikan kepada narasumber sehingga nelayan bisa fokus dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Peran pemangku kepentingan

- a. Dinas Pendidikan: Mendukung secara Lembaga, memfasilitasi dan Menyusun regulasi-regulasi pelaksanaan, Menyusun alokasi anggaran
- b. Kepala sekolah: Memfasilitasi nelayan yang berpotensi memberikan pembelajaran.
- c. Pengawas sekolah: Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembelajaran baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatannya dan melakukan supervise proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan instrument supervise pembelajaran.
- d. Kepala Desa : Memberikan dukungan izin kegiatan, Fasilitas dan pengalokasian anggaran ADD.
- e. Guru : Menyusun perangkat pembelajaran bersama nelayan mulai dari silabus, Program pengajaran, RPP, dan alat evaluasi.

Peneliti melakukan sesi wawancara dengan inovator apakah sudah terdapat Standar Operasional Prosedur dalam Program Nelayan Masuk sekolah, mengatakan:

“ dalam program nelayan masuk sekolah saya belum sempat buat SOP karena sempat terkendala pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah dikarenakan Corona. Tidak ada pelaksanaan tatap muka jadi tidak terlaksana juga program nelayan masuk sekolah. belum bisa juga karena jadwal nelayan belum bisa kita pastikan kapan ada waktu yang bisa ditetapkan untuk mengajar. nanti akan kita buat SOP agar pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah lebih efektif” (hasil wawancara RK, tanggal 31 January 2022)

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa program nelayan masuk sekolah belum memiliki SOP dikarenakan pelaksanaan sempat terkendala akibat Corona. Dari hasil wawancara inovator menjelaskan akan membuat Standar Operasional Prosedur sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Sedangkan menurut pegawai dalam sesi wawancara. Apakah Program Nelayan Masuk Sekolah telah membuat standar prosedur operasi yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan: mengatakan

“dalam program nelayan masuk sekolah belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga dalam pelaksanaan program nelayan masuk sekolah masih terdapat kendala dikarenakan belum ada prosedur kerja yang ditetapkan”(Hasil wawancara melalui telepon HS, Tanggal 31 Januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas program nelayan masuk sekolah belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) sehingga pelaksanaan masih sering terkendala.



Dilihat dari sesi wawancara yang dilakukan dengan guru, apa hambatan dari struktur birokrasi nelayan masuk sekolah, mengataka:

“dalam struktur birokrasi yang saya lihat belum ada hambatan, dari mulai izin dari desa setempat sampai mennyusun pembelajarn belum ada kendala sampai saat ini” (Hasil wawancara AA melalui telepon, tanggal 31 januari 2022).

Ditinjau dari aspek Struktur Birokrasi dalam program nelayan masuk sekolah sudah cukup jelas dimana semuanya sudah memiliki peran dalam pelaksanaan program Nelayan Masuk Sekolah dan memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing, Tetapi belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga masih sering muncul kendala-kendala dalam pekalsanaan.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian telah di jelaskan, dalam melihat implemantasi program Nelayan Masuk Sekolah di Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep sudah terimplementasikan atau belum maka peneliti mengangat beberapa indikator Menurut Edward III dalam Subarsono (2011;90-92) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan berikut:

#### **1. Komunikasi**

Kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para



pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Strategi komunikasi yang meliputi anggota penyuluh, informasi yang disampaikan, menggunakan media yang efektif, peran serta masyarakat dan hasil dalam sebuah sosialisasi merupakan salah satu faktor penting dalam proses penyampaian proses atau informasi kepada masyarakat. Mulyati (2014). Mengenai komunikasi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan, dalam proses implemmentasi Program Nelayan Masuk Sekolah di Pulau Balang Caddi dapat disimpulkan bahwa adanya komunikasi yang dilakukan oleh inovator kebijakan dengan pelaksana kebijakan sangat bagus. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta didik dapat mempermudah pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat dikembangkan di beberapa pulau. dalam proses pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah dalam hal ini sekolah bertanggung jawab dalam pengimplementasian Program Nelayan Masuk sekolah di Pulau Balang Caddi.

## 2. Sumber daya

Sumber daya yang merupakan faktor kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam implementasi program nelayan masuk sekolah yaitu, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Van

Meter dan Varn Horn (dalam widodo 1974) Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa Sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan.

Dalam hal ini dengan memilih sumber daya manusia yang merupakan alhi dalam hal kelautan yang dapat diajarkan kepada anak didik di sekolah sudah cukup bagus tetapi masih perlu merekrut beberapa narasumber sehingga dalam pelaksanaan bisa lebih efektif, mengenai sumber daya anggaran yang diambil dari dana BOS tetapi belum terealisasi sehingga menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan komitmen dan sikap aparat pelaksana terhadap program, terkhusus dari mereka yang menjadi pelaksana dari program, terutama dalam hal aparatur birokrasi. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti keinginan para pembuat kebijakan atau program, akan tetapi apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda

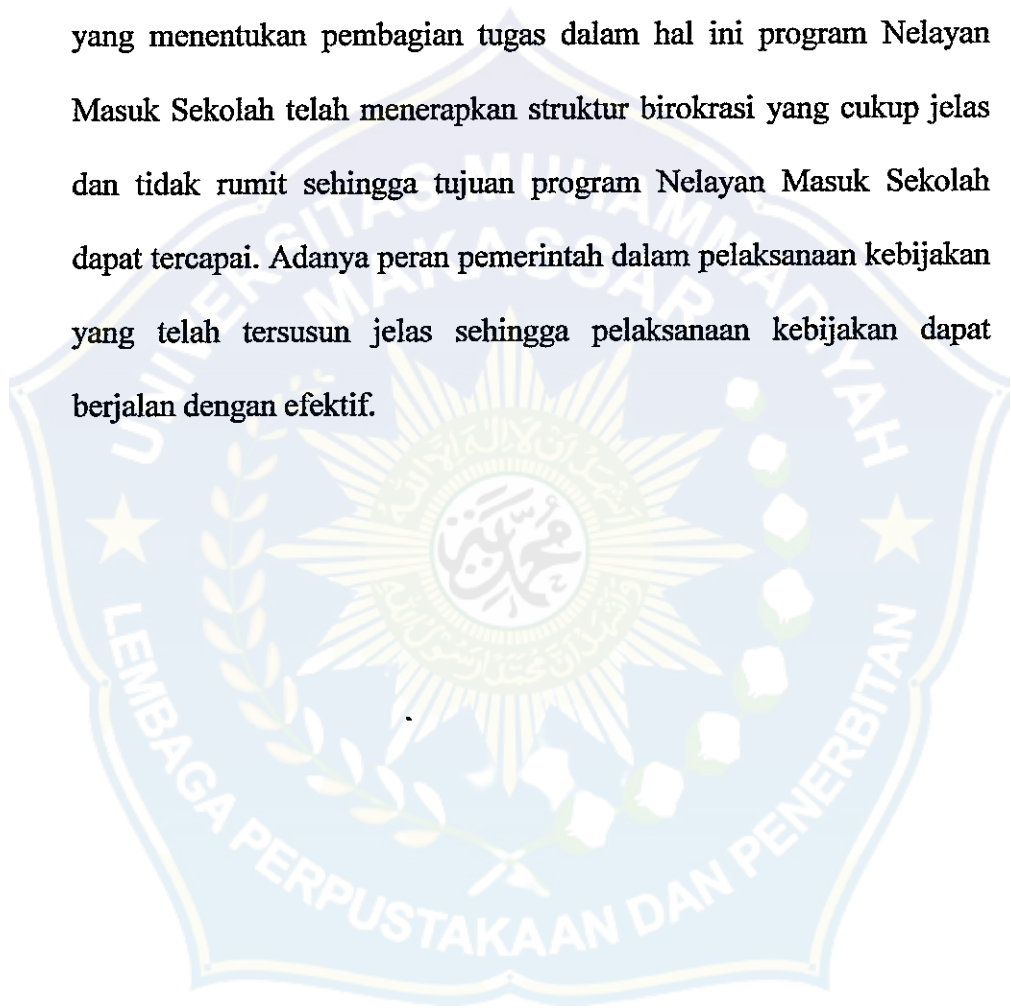
dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif Edward III (Agustino, 2008)

Disposisi atau sikap para pelaksana dalam menjalankan sebuah kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam hal ini sikap para pelaksana Program Nelayan Masuk Sekolah sangat mendukung dan merespon, dengan adanya program ini dapat berkembang baik kedepannya dengan keterbukaan tentang program nelayan masuk sekolah, adanya program tersebut juga dapat mengatasi kekurangan guru. Sikap para pelaksana dapat dilihat dari tanggung jawab pelaksana dalam melaksanakan tugasnya, di tersebut dilihat dari komitmen dalam melaksanakan kebijakan. Keterbatasan dalam melaksanakan kebijakan adalah salah satu penyebab diberikan insentif materi kepada para pelaksana kebijakan. Meskipun masih ada hambatan dalam penetapan jadwal pelaksana sehingga pelaksanaan kebijakan masih sering terkendala. Ketika sikap pelaksana kebijakan baik akan mudah memahami alur tujuan program, sehingga akan terpengaruh terhadap keberhasilan program, ketika sikap pelaksana negative sehingga masyarakat tidak mengetahui hakikat tujuan program. Khasana dkk (2018) Vol. 2 No. 2

#### 4. Struktur birokrasi

Robbins dan Judge (2014: 231) Struktur organisasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal.

Ketika struktur organisasi tidak kondusif maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya tidak efektif dan menghambat jalannya implementasi kebijakan. Nursalim (2018). Mengenai struktur birokrasi yang menentukan pembagian tugas dalam hal ini program Nelayan Masuk Sekolah telah menerapkan struktur birokrasi yang cukup jelas dan tidak rumit sehingga tujuan program Nelayan Masuk Sekolah dapat tercapai. Adanya peran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan yang telah tersusun jelas sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana yang telah dijabarkan dan dijelaskan dalam Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah di Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Komunikasi dalam Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah dapat mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan dimana komunikasi antara inovator kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan melakukan sosialisasi sehingga tujuan program dapat di mengerti sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan. Sumber Daya, dilihat dari sumber daya manusia yang dipilih sudah sangat baik, karena sumber daya manusia yang dipilih memiliki skill tentang laut yang sangat baik, tetapi sumber daya manusia masih kurang sehingga pelaksanaan program kurang efektif sedangkan sumber daya anggaran diambil dari dana BOS untuk fasilitas nelayan dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah, tapi belum ada fasilitas yang diberikan kepada nelayan. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat mendukung peserta didik dalam mempelajari kearifan lokal yang ada di pulau baling caddi dan sikap pelaksana dapat dilihat dari tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan Struktur Birokrasi Program Nelayan Masuk Sekolah melakukan sesuai



tugasnya masing-masing sehingga pelaksanaan program nelayan masuk sekolah tetapi belum memiliki SOP sehingga masih sering muncul Kendala-kendala dalam pelaksanaan sehingga tidak berjalan dengan efektif.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian diatas, ada beberapa saran yang direkomendasikan peneliti guna mendukung Program Nelayan Masuk Sekolah di Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut:

1. Inovator sebaiknya melakukan sosialisasi kebeberapa sekolah sehingga Program Nelayan Masuk Sekolah dapat di diterapkan sehingga dapat menanggulangi permasalahan kekurangan guru.
2. Sekolah Perlu menerapkan intensif kepada nelayan sehingga nelayan lebih semangat dalam menjalankan tugasnya.
3. Sekolah Perlu adanya melakukan perekrutan narasumber, ketika narasumber yang satu berhalangan dapat digantikan dengan narasumber yang lain.
4. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur sehingga pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah berjalan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke Impelementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: bumi aksara.
- Agustiono. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn. [http://kertyawitaradya, wordpre ss](http://kertyawitaradya.wordpress.com), diakses 5 Sebtember 2010.
- Ali, Faried, & Andi Syamsu Alama. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Budi N & Soeaidy. Minto Hadi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar. Vol. 1 No 5. Hal 862
- Databoks. (2021) Terdapat 157 Ribu Siswa Putus Sekolah pada Tahun Ajaran 2019-2020. Diperoleh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/11/terdapat-157-ribu-siswa-putus-sekolah-pada-tahun-ajaran-20192020>.
- E. Mulyasa. 2013. *Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan*. Jakarta Bumi Aksara.
- Fitriah Y. alim. 2019. Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pembudidayaan Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Poso. Vol 12 No. 1. Hal 10
- Harsono, H. 2002. *Implementasi kebijakan dan politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- H. A. R., Tilaar dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan pendidikan*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Hs. M. Z. H. 2018. *Pemberian tunjangan khusus daerah terpencil untuk perbaikan kinerja guru SMP di kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kab. Pangkep*. Jurnal studi pendidikan Vol. XVI. No 2
- Imron, Masyuri. 2003. *Keiskinan dalam masyarakat nelayan*. Dalam jurnal masyarakat dan budaya. PMB-LIPI. Vol 5. No 1
- Khasana dkk. 2018. *Pengaruh sumber daya dan Disposisi pelaksana terhadap keberhasilan impelementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang*. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN). Vol 02. No 02
- Khioiron Rosyadi. 2004. *Pendidikan Profetik*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Arifin. 1995. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Publik Policy*, New York: HarperCollins.
- Mulyati. 2014. *Strategi komunikasi dalam sosialisasi program keluarga berencana untuk menekankan pertumbuhan jumlah penduduk kelurahan sangasanga dalam kecamatan sangasanga*. jurnal ilmu komunikasi. Vol 2. No 2
- Maryuni. 2015. Implementasi Progra Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pontiana. Vol 10. No 1. Hal 19
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta. Grasindo.
- Nursalim. 2018. *Implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar oleh unit pelaksana teknis pasar Cikatomas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasik Malaya tahun anggaran 2017*. Jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5 No 3
- Oemar Hamalik. 2007. *Dasar-dasar pengembangan kurikulum*. Bandung. PT. Remaja.
- PERDA NO 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Republika.co.id. (2021) Pandangan dan Tantangan Pendidikan Indonesia. Diperoleh dari <https://www.republika.co.id/berita/grqnuu483/pandangan-dan-tantangan-pendidikan-indonesia>.
- Robbins, Stephen P. dan Timothi A. judge. 2014. *Perilaku Controversies Application*. Jakarta: Prehelindo
- Sindonews.com. (2021) Realitas Kekurangan Guru dan Program Merdeka Belajar 2021. Diperoleh dari <https://nasional.sindonews.com/read/303068/18/realitas-kekurangan-guru-dan-program-merdeka-belajar-2021-1610733664/10>.
- Setiawan. 2004. *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Subarsono, A.G. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung. Alvabet CV
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Jakarta: Media Pessindo.

Teguh Aris Munandar. Dadan Darmawan. 2020. Implementasi Progm Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Lontar Kabupaten Serang. Vol. 5 No 2. Hal 126

Teropong Bulusaraung. (2019) Nelayan Masuk Sekolah, Gagasan Brilian Cerdas Anak Pulau. Diperoleh dari <https://teropongbulusaraung.com/nelayan-masuk-sekolah-gagasan-brilian-cerdaskan-anak-pulau/7919/>.

Usman Husaini. 2006. *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

UU NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .

UU NO.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Wikipedia.(2021) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.Diperoleh dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pangkajene\\_dan\\_Kepulauan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pangkajene_dan_Kepulauan).

Yogia & Suri. 2020. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Vol 9 No 3. Hal 247

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**







# **PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN** **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene - KP. 90611

## **IZIN PENELITIAN**

Nomor : 254/PT/DPMPTSP/IX/2021

### **DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep;
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	AENUN JARIAH
Nomor Pokok	105611126716
Tempat/Tgl. Lahir	Pulau Sarappo / 09 Juli 1997
Jenis Kelamin	Perempuan
Pekerjaan	Mahasiswa
Alamat	Pulau Sarappo Lempu Kel/ Desa Mattiro Langi Kec. Liukang Tupabbiring Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti	Pulau Balang Caddi Kecamatan Liukang Tupabbiring Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Survey dengan Judul :  
 "Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep"

Lamanya Penelitian : 9 September 2021 s/d 3 November 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 17 September 2021



Tembusan Kepada Yth :  
 1. Bupati Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);  
 2. Kepala Kantor Kesbang;  
 3. Arsip;



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu

**Drs. Bachtar, M.Si**  
 PENYAHUTAMA MUJDA / IV c  
 Nip. 19760930 199511 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
DINAS PENDIDIKAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS**



**SMPN 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING**

Alamat P. Balang Caddi Kel Mattiro Bintang Kec. Liukang Tupabbiring Kode POS 90671

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 422/102/SMPN.8.STP.LK.TB/X/2021

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Izin Penelitian Nomor: 254/IPT/DPMPTSP/IX/2021, maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: AENUN JARIAH
Nomor Pokok	: 105611126716
Tempat/Tgl Lahir	: Pulau Sarappo/09 Juli 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Pulau Sarappo Lompo Desa Mattiro Langi Kec Liukang Tupabbiring Kab Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti	: SMPN 8 Satap Lk Tupabbiring, Pulau Balang Caddi Kec Liukang Tupabbiring Kab Pangkajene dan Kepulauan.
Judul penelitian	: Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kab Pangkajene dan Kepulauan.

Telah melakukan Penelitian di SMPN 8 Satap Liukang Tupabbiring terhitung tanggal 9 September 2021 s/d 3 November 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulan Balang Caddi, 20 Oktober 2021

Kepala UPT

**ADI SUFRADI, S.Pd.M.Pd**

NIP. 19820524 201001 1 012





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865598

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Aenun Jariah  
NIM : 105611126716  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8%	10 %
2	Bab 2	23%	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	3%	10%
5	Bab 5	0%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 22 Januari 2022 4  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nursinah S. Hum M.I.P.  
NBM 964 591

# BAB I AENUN JARIAH

105611126716

by Tahap Tutup



**Submission date:** 22-Jan-2022 06:53PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1745929201

**File name:** BAB\_I\_18.docx (14.63K)

**Word count:** 1036

**Character count:** 6838

# BAB I AENUN JARIAH 105611126716

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id)  
Internet Source

3%

2

Submitted to Universitas Islam Indonesia  
Student Paper

3%

3

[stpengataadvocates.wordpress.com](http://stpengataadvocates.wordpress.com)  
Internet Source

2%



Exclude quotes

Or

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

On



The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a shield-shaped emblem. It features a central sunburst with a crescent and star, surrounded by a wreath. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is arched across the top, and "MAKASSARA" is written below it. At the bottom, it says "LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN".

# BAB II AENUN JARIAH

105611126716

*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 22-Jan-2022 06:53PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1745929321

**File name:** BAB\_II.\_14.docx (37.88K)

**Word count:** 2530

**Character count:** 17711

## BAB II AENUN JARIAH 105611126716

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Haerul ., Haedar Akib, Hamdan .. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA (MTR) DI KOTA MAKASSAR", 'Universitas Negeri Makassar', 2017 Internet Source	4%
2	ojs.unsimar.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	2%
5	hcucunkindarasa.wordpress.com Internet Source	1%
6	www.neliti.com Internet Source	1%
7	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%

8	Yonathan K.M, Syarifuddin, Mardalina, Sururuddin. "Penerapan Kaidah Penyiaran di Stasiun D'Radio Jambi", MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2019 Publication	1 %
9	Submitted to poltekim Student Paper	1 %
10	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
12	www.wawasanpendidikan.com Internet Source	1 %
13	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1 %
14	dspace.uin.ac.id Internet Source	1 %
15	ojs.unm.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	1 %
17	ejournal.kemensos.go.id Internet Source	1 %

Submitted to Universitas Negeri Manado

18

Student Paper

1 %

19

digilib.uin-suka.ac.id  
Internet Source

1 %

Exclude quotes

OR

Exclude matches

Exclude bibliography

OR





The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a shield-shaped emblem. It features a central sunburst with a crescent and star, surrounded by a wreath. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is arched across the top, "MAKASSAR" is in the center, and "LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN" is arched across the bottom. Two stars are positioned on the left and right sides of the emblem.

# BAB III AENUN JARIAH

## 105611126716

*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 22-Jan-2022 06:54PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1745929420

**File name:** BAB\_III\_21.docx (15.05K)

**Word count:** 734

**Character count:** 4846



## BAB III AENUN JARIAH 105611126716

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

7%

2

Reza Adi Primawan, Abraham Nurcahyo.  
 "Peranan Mbah Wo Kucing Dalam Pelestarian  
 Reog Dan Warok Di Kabupaten Ponorogo",  
 AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN  
 PEMBELAJARANNYA, 2015

Publication

2%

3

es.slideshare.net

Internet Source

1%



Exclude quotes Off

Exclude matches &lt; 1%

Exclude bibliography Off



# BAB IV AENUN JARIAH

## 105611126716

*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 19-Jan-2022 05:39AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1743782553

**File name:** BAB\_IV\_-\_Turnitin.docx (29.67K)

**Word count:** 4749

**Character count:** 31347

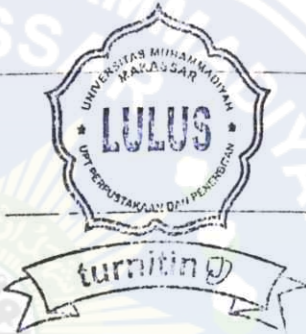
BAB IV AENUN JARIAH 105611126716

ORIGINALITY REPORT

3%	3%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	2%
	Internet Source	
2	repository.fisip-untirta.ac.id	2%
	Internet Source	



Exclude quotes On  
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

The background features a large, light blue watermark of the Universitas Muhammadiyah Makassar logo. The logo is a shield-shaped emblem with a central sunburst and Arabic calligraphy. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR' is arched across the top, and 'LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN' is arched across the bottom. Two five-pointed stars are positioned on either side of the central emblem.

# BAB V AENUN JARIAH

## 105611126716

by Tahap Tutup

**Submission date:** 22-Jan-2022 06:51AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1745716028

**File name:** BAB\_V\_21.docx (9.88K)

**Word count:** 243

**Character count:** 1635

---

## BAB V AENUN JARIAH 105611126716

## ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

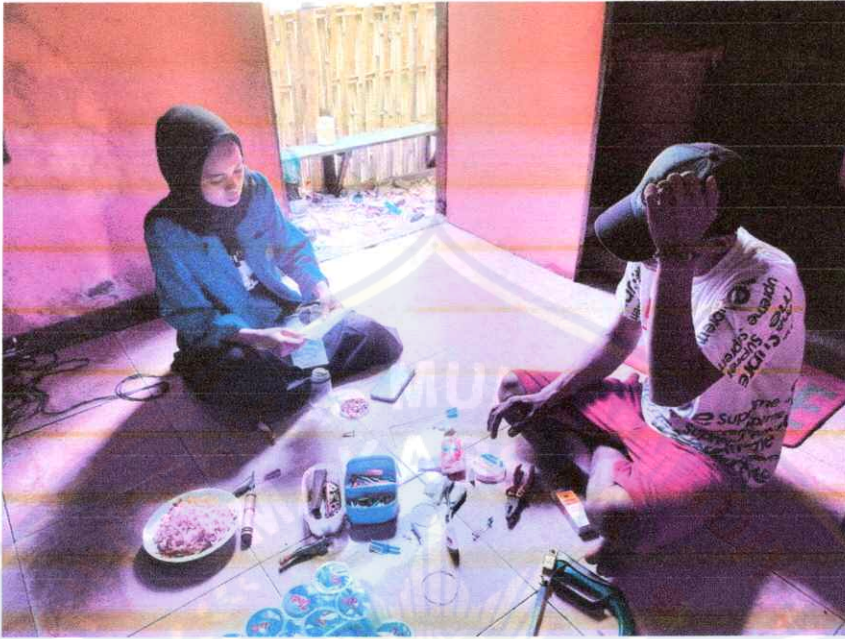
On

Exclude matches

21%

turkinn





Dokumentasi wawancara dengan Dg. Haya, Narasumber Nelayan Masuk Sekolah  
Jumat 8 Oktober di Rumah Nelayan



Dokumentasi pelaksanaan pembuatan jarring. Jumat 8 Oktober 2021 di Halaman  
Rumah Nelayan



dokumentasi wawancara dengan Bapak Andi Asriono S.Pd. Guru SMPNegeri 8 Satap Liukang Tupabbiring. jumat 8 Oktober di rumah Nelayan

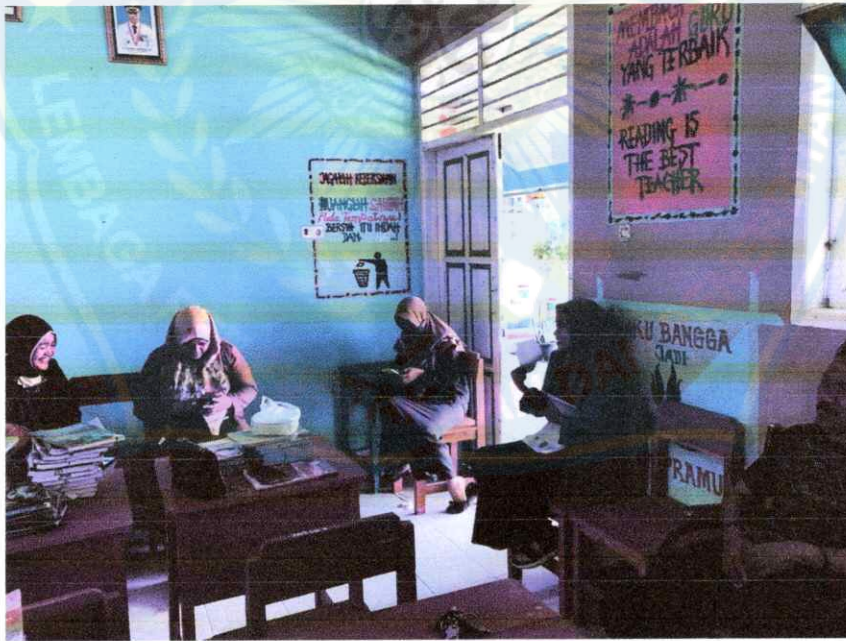


Dokumentasi wawancara Ibu Rukmini S.Pd., M.Pd Kepala bidan guru dan pendidikan sekaligus inovator kegiatan. Kamis 23 Sebtember 2021 di Kantor Dinas Pendidikan





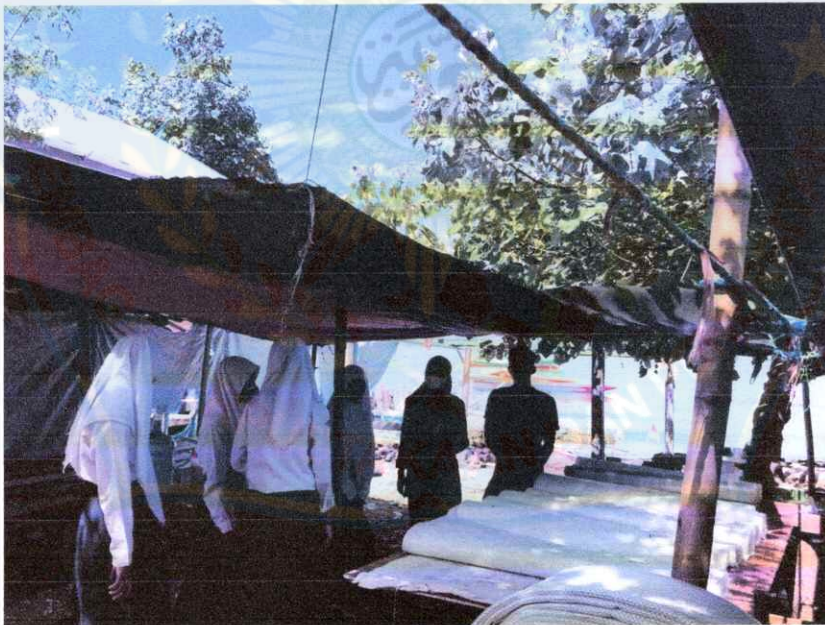
Dokumentasi wawancara Babiah. Siswa Guru SMPNegeri 8 Satap Liukang  
Tupabbiring. Jumat 8 Oktober 2021 di Rumah Nelayan



Dokumentasi wawancara Ibu Febiola Guru SMPNegeri 8 Satap Liukang  
Tupabbiring. Kamis 7 Oktober 2021 di Ruang guru



Dokumentasi pelaksanaan pembuatan umpang ikan Jumat 8 Oktober 2021 di Rumah Nelayan



Dokumentasi pelaksanaan pembuatan perahu dari fiber. Kamis 7 Oktober 2021





Dokumentasi pelaksanaan perbaikan mesin. Rabu 6 Oktober 2021





## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Implementasi Nelayan Masuk Sekolah

- a. bagaimana menurut ibu tentang program nelayan masuk sekolah, sedang kita ketahui bahwa setiap harinya nelayan hanya memancing atau menangkap ikan,
- b. bagaimana nelayan meningkatkan pembelajaran disekolah
  1. komunikasi
    - a. bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program nelayan masuk sekolah
    - b. Dalam pelaksanaan program nelayan masuk sekolah bagaimana komunikasi sekolah dengan nelayan
    - c. Bagaimana komunikasi bapak dengan sekolah dalam pelaksanaan nelayan masuk sekolah
  2. Sumber daya
    - a. bagaimana tahapan dalam pemilihan narasumber
    - b. Bagaimana sekolah memilih nelayan untuk dijadikan narasumber
    - c. Bagaimana proses bapak bisa mau menjadi narasumber nelayan masuk sekolah
    - d. darimana sumber daya anggaran yang diambil dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah
    - e. Apakah ada fasilitas yang disediakan sekolah untuk pelaksanaan nelayan
  3. Disposisi
 

Bagaimana sikap bapak dalam menghadapi siswa yang tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan nelayan
  4. Struktur organisasi
 

apakah struktur organisasi berjalan sesuai fungsinya masing-masing.

## RIWAYAT HIDUP



**AENUN JARIAH**, lahir pada 09 juli 1997 di Pulau Sarappo Lompo Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari empat bersaudara, buah kasih dari pasangan bapak **H. Jamuddin** dan ibu **Hj. Bollo**. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 28 Pulau Sarappo pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Satap Liukang Tupabbiring pada tahun 2013 dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Pesantren Immim Minasate'ne pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2022, penulis berhasil mendapatkan gelar S1program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan judul skripsi "Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah Di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabpaten Pangkep". Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkhusus di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar.